

Implementasi Standar Penilaian dalam Kurikulum Merdeka Di MTS Al-Quraniyah Ulujami

^{*1}La'la Himatul Ulya, ²Muhammad Ikhwan, ³Muzzarifa Nisrina

^{1,2,3}Mahasiswa Aktif, Universitas Darunnajah

*Corresponding Autor: lalahimatulya@gmail.com

Abstrak

Kurikulum merupakan “roh” pendidikan yang harus inovatif, dinamis, dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan pengguna lulusan. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2022. Salah satu perubahan yang signifikan dalam kurikulum ini adalah pada standar penilaian. Standar penilaian Kurikulum Merdeka menekankan pada penilaian proses dan hasil belajar yang berkelanjutan, serta penilaian yang berbasis portofolio. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi standar penilaian Kurikulum Merdeka di MTs Al-Quraniyah Ulujami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTs Al-Quraniyah Ulujami telah menerapkan standar penilaian Kurikulum Merdeka secara cukup baik. Hal ini terlihat dari perencanaan penilaian yang matang, pelaksanaan penilaian yang beragam, dan pelaporan penilaian yang sistematis. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti perlunya peningkatan kompetensi guru dalam penilaian, serta perlunya sosialisasi yang lebih luas kepada orang tua dan masyarakat.

Kata kunci : Standar Penilaian, Kurikulum Merdeka, Madrasah Tsanawiyah

Abstract

The curriculum is the "spirit" of education which must be innovative, dynamic and periodic in accordance with current developments in science and technology, the competencies required by society and graduate users. The Merdeka Curriculum is a new curriculum launched by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbudristek) in 2022. One of the significant changes in this curriculum is in the assessment standards. The Merdeka Curriculum assessment standards emphasize continuous assessment of learning processes and outcomes, as well as portfolio-based assessment. This research aims to examine the implementation of the Independent Curriculum assessment standards at MTs Al-Quraniyah Ulujami. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data was collected through observation, interviews and documentation. The research results show that MTs Al-Quraniyah Ulujami has implemented the Independent Curriculum assessment standards quite well. This can be seen from careful assessment planning, implementation of various assessments, and systematic assessment reporting. However, there are still several things that need to be improved, such as the need to increase teacher competence in assessment, as well as the need for wider outreach to parents and the community.

Keywords: Assessment Standards, Independent Curriculum, Madrasah Tsanawiyah

How to Cite: La'la Himatul Ulya, Muhammad Ikhwan, & Muzzarifa Nisrina. (2025). Implementasi Standar Penilaian Dalam Kurikulum Merdeka Di MTS Al-Quraniyah Ulujami.. *Journal Transformation of Mandalika*,doi <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i5.2649>



<https://doi.org/10.36312/jtm.v6i5.2649>

Copyright© 2025, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#)

License.



PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam membentuk generasi yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam

menyusun kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Salah satu aspek penting dari Kurikulum Merdeka adalah implementasi standar penilaian yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Penilaian yang baik tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, melainkan juga menggali potensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek afektif dan psikomotor.

Implementasi Standar Penilaian Kurikulum Merdeka di MTs mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pedoman tersebut mencakup beberapa aspek, termasuk standar kelulusan, standar isi, struktur kurikulum, implementasi kurikulum di madrasah, pembelajaran, dan asesmen. Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan tertentu, seperti standar kompetensi lulusan dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Panduan-panduan resmi juga telah diterbitkan untuk memandu implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah¹

Kurikulum Merdeka memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik. Salah satu elemen utama dalam implementasi kurikulum ini adalah standar penilaian. Standar penilaian menjadi landasan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dan memberikan umpan balik yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana standar penilaian diterapkan dalam praktik pembelajaran di sekolah menengah, khususnya di MTs Al-Quraniyah Ulujami.

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia telah mengalami setidaknya sepuluh modifikasi kurikulum yang berdampak pada gaya belajar siswa sejak kemerdekaannya karena merupakan bangsa yang terus belajar dari perkembangannya sendiri dalam hal desain pelajaran. Dimulai dengan Rencana Pembelajaran 1947 dan diakhiri dengan Pembelajaran Merdeka "Kemandirian Belajar" yang banyak dibicarakan, yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia telah menerapkan kurikulum tiga kali dalam waktu kurang dari satu dekade. Hal-hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia yang terus berkembang untuk pencapaian tujuan pembelajaran baik yang bersifat strategis, metodis, administratif, maupun berbasis desain sesuai dengan tren saat ini. Dengan demikian, diharapkan Indonesia mampu mempersiapkan siswa-siswa masa depan yang berdaya saing.

Kemendikbud membuat terobosan penilaian kemampuan minimal, seperti literasi, numerasi, dan survei karakter, sebagai respon atas hal tersebut. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis materi dan memahami konsep. Kemampuan siswa untuk menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata dinilai, bukan kemampuan matematis, untuk kemampuan berhitung. Aspek lainnya adalah awal, ketika siswa mengikuti tes untuk mengetahui seberapa besar mereka berpegang pada nilai-nilai karakter, agama, dan Pancasila.²

Beberapa kebijakan yang menjadi landasan implementasi Kurikulum Merdeka meliputi Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan, yang menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Selain itu, Kementerian Agama telah menerbitkan panduan-panduan resmi untuk memandu implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah, termasuk Panduan Pembelajaran dan Asesmen untuk RA, MI, MTs, MA, dan MAK. Panduan ini dikembangkan dari Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan, Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Dengan demikian,

¹ Direktorat KSKK Madrasah, 'Panduan Pembelajaran Dan Asesmen RA, MI, MTs, MA Dan MAK', 2022, 1–119.

² B A B Ii and others, 'Kajian Pustaka *Molucca Medica*, 11.April (2012), 13–45
<<http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>>.

implementasi Standar Penilaian Kurikulum Merdeka di MTs didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah dan panduan resmi yang telah diterbitkan.

METODE

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data interaktif yang terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2007: 337).

Penelitian ini dilakukan di MTs Al Quraniyah, yang berlokasi di Jl.H.Ridi Jl.Swadarma Raya No.49 15,RT.15/RW.3, Ulujami,Kec. Pesanggrahan,Kota Jakarta Selatan, Daerah khusus Ibukota Jakarta 12250. Sumber- sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, PKS Kurikulum dan guru-guru di lingkungan MTs Al Quraniyah Ulujami. Dengan menggunakan metode ini kita dapat mendengar informasi langsung dari narasumber dengan data yang dapat di percaya.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam penelitian implementasi standar penilaian kurikulum merdeka, kami mendapatkan beberapa informasi terkait standar penilaian di MTs Al Quraniyah. Dalam standar penilaian ini kami menyajikan tabel dimana tabel ini merupakan soal dan jawaban dari hasil observasi yang kami lakukan di MTs Al Quraniyah sebagai berikut

No	Pertanyaan	Hasil wawancara
1.	Bagaimana proses berjalannya kurikulum merdeka di sekolah ini?	Dalam menjalankan kurikulum merdeka di MTs Al-Quraniyah ini sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah,
2.	Hal apa saja yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah ini?	Yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah ini yaitu tantangan mengenai p5 (praktek) karena keterbatasan sarana dan prasarana dan waktu.
3.	Apa saja persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ?	mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya

Implikasi Terhadap Manajemen Kurikulum

Setiap perubahan sudah barang tentu akan menyebabkan implikasi pada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan tersebut. Begitu pula dengan penerapan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang menerapkan konsep merdeka belajar. Penerapan kebijakan merdeka belajar ini akan berimplikasi pada segala aspek dalam lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah dalam aspek kurikulum. Dengan penerapan merdeka belajar, maka harus dilakukan *adjsument/penyesuaian* dari kurikulum yang telah diberlakukan sebelumnya terhadap kebijakan merdeka belajar ini. Dalam merdeka belajar disebutkan bahwa adanya Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dengan adanya penyederhanaan ini, sudah barang tentu para pendidik diharuskan untuk memiliki strategi pembelajaran yang tepat, agar dalam pelaksanaan pembelajaran tetap dapat mencapai pada tujuan dan capaian pembelajaran. Selain itu, terdapat juga konsep yang mengatakan Ujian Nasional (UN) digantikan

oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Dengan adanya perubahan sistem evaluasi akhir yang pada awalnya berpatokan pada hasil evaluasi kognitif yang dirubah menjadi penilaian pada kompetensi dan karakter peserta didik, maka dengan itu diharuskan adanya penyesuaian kurikulum yang diterapkan di sekolah. Hal ini wajib dilakukan agar evaluasi akhir yang dimaksud dapat mencapai kriteria yang diharapkan.³

Implikasi Terhadap Sistem Penilaian

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (17) dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan mengatur delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.⁴ Delapan standar nasional pendidikan ini menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari standar nasional pendidikan, karena itu standar penilaian mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam pendidikan. Setiap pendidik harus dapat memberikan pelayanan yang prima dan memperlakukan peserta didik secara adil, objektif, dan bertanggungjawab, tidak terkecuali dalam penilaian pendidikan. Penilaian yang adil adalah penilaian yang tidak membedakan peserta didik antara satu dan lainnya, baik dilihat dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, warna kulit, golongan, bahasa, dan gender.⁵

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, pada pasal 1 disebutkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.⁶ Artinya, Pemerintah sudah mengatur bagaimana tahap-tahap melakukan penilaian, langkah-langkah operasional yang harus ditempuh oleh pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

- 1) Pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- 2) Satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- 3) Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Implikasi dari uraian di atas adalah setiap pendidik harus mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan konsep standar penilaian, baik yang menyangkut tentang mekanisme,

³ Wiwi Uswatiah and others, 'Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar Terhadap Manajemen Kurikulum Dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi', *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3.1 (2021), 28–40 <<https://doi.org/10.47467/jdi.v3i1.299>>.

⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional

⁵ Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009. Hlm. 43

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

prosedur, maupun instrumen penilaian yang harus digunakan. Untuk itu guru harus mengetahui dan memahami PP Nomor 19 Tahun 2005, yang diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, dan terakhir diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini karena telah diatur segala aspek penting tentang pendidikan yang juga di dalamnya memuat penilaian, sebagai rujukan atau panduan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pada Bab IV Pasal 5 sebagai berikut⁷ :

- 1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- 2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- 3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- 4) Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- 5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- 6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
- 7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- 8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- 9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

Uraian mengenai sistem penilaian di atas, jika dihubungkan pada penerapan merdeka belajar, terdapat implikasi yang cukup signifikan. Namun implikasi tersebut terdapat pada teknik evaluasi dan penilaian terhadap peserta didik saja. Dalam hal penilaian pada kegiatan akhir pembelajaran, yang semula melalui penilaian pada Ujian Nasional (UN) maka harus digantikan dengan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Selain itu, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang semula mengacu pada sistem penilaian secara nasional, maka dengan penerapan merdeka belajar ini sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio. Dari perubahan pelaksanaan secara teknis ini sudah barang tentu akan berakibat pada perubahan sistem penilaian pada setiap kegiatannya.⁸

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan secara otomatis akan berpengaruh pada manajemen kurikulum dan sistem penilaian di tiap jenjang pendidikan. Pelaksanaan adaptasi terhadap penerapan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan perubahan dan penyesuaian pada kurikulum dan sistem penilaian. Namun, pada hakikatnya penyesuaian tersebut adalah salah satu bagi lembaga pendidikan formal cara dalam usahanya mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

⁸ Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik, Prosedur, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009. Hlm. 44

Implementasi standar penilaian Kurikulum Merdeka masih relatif baru, sehingga masih banyak tantangan yang dihadapi oleh guru dan sekolah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang berkelanjutan. Implementasi standar penilaian Kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penilaian yang holistik, berkesinambungan, dan terintegrasi dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan belajar peserta didik. Penilaian tersebut juga dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat KSKK Madrasah, 'Panduan Pembelajaran Dan Asesmen RA, MI, MTs, MA Dan MAK', 2022, 1–119
2. Ii, B A B, A Diskripsi Teori, Tinjauan Pengertian, and Strategi Pembelajara, 'Kajian Pustaka ° *Molucca Medica*, 11.April (2012), 13–45 <<http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>>
3. Uswatiah, Wiwi, Neni Argaeni, Masruroh Masrurah, Dadang Suherman, and Ujang Cepi Berlian, 'Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar Terhadap Manajemen Kurikulum Dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi', *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3.1 (2021), 28–40 <<https://doi.org/10.47467/jdi.v3i1.299>>
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). PanduanMerdeka Belajar—Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI
5. KumparanNews. (n.d.). Nadiem Luncurkan 4 Program Merdeka Belajar Perguruan Tinggi. kumparan. Retrieved May 4, 2020, from <https://kumparan.com/kumparannews/nadiem-luncurkan-4-programmerdeka-belajar-perguruan-tinggi-1shlB5gIfgs>
6. Barnlund, D. C. (2008). *Communication in a Global Village: The Communication and Conflict Resolution Process*. Boston: Allyn and Bacon.
7. Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
8. Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Glencoe, IL: Free Press.
9. Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
10. Herzberg, F. (1959). *The Motivation to Work*. John Wiley & Sons.
11. Jehn, K. A. (1995). A Multimethod Examination of the Benefits and Detriments of Intragroup Conflict. *Administrative Science Quarterly*, 40(2), 256-282.
12. Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The Social Psychology of Organizations*. New York: Wiley.
13. Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
14. March, J. G., & Simon, H. A. (1958). *Organizations*. John Wiley & Sons.
15. Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN OBSERVASI

